KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

SALE91KS

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

	Me.								
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 7 1 0 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					Final Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 NPWP : [6 8 8 0 7 5 6 1 3 7 2 2 0 0 0									
A.2 N	IK :								
A.3 Nama : EKO RIYANTO									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)		TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.2	B.3	B.3 B.4		B.5	B.6	B.7	
	4	21-402-01	1.174.8	1.1	74.800	0	15	176.220	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 046/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022									
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 8 dd 0 4 mm 2						2 0 2 2 <i>уууу</i>			
B.9	.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
	Nomor: Tanggal dd mm yyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2 Nama Instansi Pemerintah :			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3	ID Subunit C		$\overline{\Box}$				ППП		
C.4	Tanggal	:	2 8 dd 0 4 mn	$\frac{}{}$				_	
C.5	Nama Penan	_	HARI JUMADI						
C.6								benar dan telah saya	
			Sesuai dengan ketentuan y elektronik sehingga tidak di	vang berlaku, Direktorat Jendo iperlukan tanda tangan.	eral Paja	k mengatur bahwa (dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	